

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Beberapa alasan pokok mengapa penelitian terhadap konflik negara dan rakyat (analisis aktor dan kepentingan pada kasus Wadas, Purworejo, Jawa Tengah) penting untuk dilakukan, yaitu latar belakang empirik dan latar teoritis. Latar belakang empirik didasarkan pada pertimbangan berikut :

Pertama, hingga tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo gencar merebut lahan dan melakukan pengukuran tanah di Desa Wadas untuk aktivitas pertambangan batu andesit guna memasok material pembangunan Bendungan Bener yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Masyarakat Desa Wadas mempertahankan kawasan Wadas semata-mata hanya untuk melestarikan lingkungan yang sudah dari dulu telah memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitar. Permasalahan lingkungan sering kali muncul karena tidak ada kesepakatan atau pemahaman bersama mengenai isu lingkungan. Sumber daya alam apabila terus menerus dipakai serta dieksploitasi oleh pemerintah, bisnis dan negara, maka akan sumber daya alam itu akan habis. Sumber daya nonhayati didapatkan dengan mengorbankan sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah sumber daya akan terus ada dikarenakan adanya generasi secara berkala, namun itu memerlukan mekanisme waktu yang panjang seperti pada kasus penolakan masyarakat terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

Kedua, Konflik penolakan masyarakat terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, bermula dari rencana Pemerintah Pusat membangun Bendungan Bener sejak tahun 2017, dimana Bendungan Bener adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Proyek Bendungan Bener memerlukan pasokan batu andesit sebagai material pembangunan, oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah kebutuhan batu andesit akan diambil di Desa Wadas. Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 590/41 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Lokasi salah satunya adalah Desa Wadas. Surat Keputusan (SK) Gubernur ini diperbarui pada tahun 2020 melalui Surat Keputusan Nomor 539/29, kemudian terakhir diperbarui kembali melalui Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021. Warga Desa Wadas merasa dengan dijadikan Wadas sebagai pemasok batu andesit sebagai material pembangunan Bendungan Bener akan merusak lingkungan sekitar. Masyarakat menolak dengan berbagai upaya seperti menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah, kemudian warga pada tahun 2021 pernah menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas di terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang lokasi izin pengadaan lahan di Desa Wadas, namun tuntutan di ajukan ditolak oleh PTUN Semarang, terakhir pada tanggal 8 Februari 2022 bermula dengan adanya penolakan sebagian warga yang menolak aktivitas pengukuran tanah dan penghitungan tanaman tumbuh yang dilakukan oleh Badan Pertanahan

Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian. Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian aksi protes yang berujung bentrok antara masyarakat yang menolak dengan aparat bersenjata lengkap. Kemudian aparat gabungan POLRI dan TNI mengamankan sekitar 64 warga yang menolak terhadap rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Ketiga, dengan adanya kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas akan merusak kelestarian di kawasan Wadas. Penambangan batu andesit di Desa Wadas ini merupakan bagian dari logika kapitalis ruang yang dapat dilihat dari berbagai pola yang dilakukan oleh pemerintah bersama para kapitalis pertambangan dalam memaksakan terjadinya aktivitas industrialisasi pertambangan batu andesit ini. Berikut adalah lokasi dari penelitian ini.

Desa Wadas terletak di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa tengah dimana penduduknya hidup damai, aman serta makmur. Penduduk Desa Wadas mayoritas hidup dari hasil perkebunan dan pertanian. Desa Wadas memiliki luas daerah 405.820 hektar, dimana rinciannya 381.820 hektar ialah tanah kering serta 24.000 hektar selebihnya berbentuk tanah sawah (<https://wadas-bener.purworejokab.go.id/>). Desa Wadas juga mempunyai keanekaragaman hayati, memperoleh beberapa komoditas perkebunan dan kehutanan berupa sangon, kelapa, jati mahoni, pisan, akasia, kapulaga, aren, serta cengkeh. Data menurut laman Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo jumlah penduduk Desa Wadas tercatat sejumlah 1.445 jiwa, dengan rincian penduduk pria sekitar 771 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 748 jiwa. Desa Wadas memiliki luas 405.820 hektar tersebut mempunyai harta karun yang berbentuk batu andesit. Batuan andesit

yang terkandung di Desa Wadas menembus 30 juta m³. Batu andesit merupakan batuan jenis vulkanik entrusif, dimana batu andesit ini bagus untuk fondasi bangunan karena memiliki ketahanan yang lama dan kuat. Desa Wadas semestinya di manfaatkan bercocok tanam, hal ini dicatat dalam Peraturan Daerah Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menetapkan Desa Wadas menjadi wilayah perkebunan.

Keempat, dengan adanya pembebasan lahan dan penambangan batu andesit di Desa Wadas menimbulkan perpecahan dari kelompok masyarakat Desa Wadas itu sendiri. Masyarakat yang pro terhadap penambangan batu andesit tersebut untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener, pasalnya mereka mendapatkan uang konvensasi/ganti rugi tanah dan beranggapan dengan dibangunnya bendungan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya di Desa Wadas. Bertolak belakang dengan masyarakat yang kontra akan pembangunan dan penambangan batu andesit di Desa Wadas, pasalnya mereka beranggapan bahwa jika penambangan batu andesit dilakukan akan menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian alam yang mana bagi masyarakat Desa Wadas sebagai sumber mata kehidupan untuk keberlangsungan hidup. Konflik muncul dari masyarakat setempat antar masyarakat pemerintah dengan masyarakat yang kontra atas rencana pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

Selain latar belakang secara empirik, terdapat juga latar belakang secara teoritik yaitu sebagai berikut:

Pertama, terdapat pendapat dari teori Karl Marx dimana teori ini menjelaskan penyebab terjadinya konflik ialah sejarah kehidupan masyarakat ditentukan oleh sebuah materi atau benda yang berbentuk alat produksi, dan alat produksi ini untuk menguasai kehidupan masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang dihasilkan akan menghasilkan komoditas dan komoditas tersebut diperlukan masyarakat secara sukarela. Marx menyatakan fakta terpenting adalah materi ekonomi karena konflik ini bisa terjadi ketika faktor ekonomi dijadikan sebagai penguasaan terhadap alat produksi.

Mengenai terjadinya konflik negara dan rakyat dalam penolakan terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas dimana kekayaan alam tanah dan batu dapat menghasilkan ekonomi, penguasaan terhadap lahan dilakukan dengan cara melakukan berbagai intervensi dan tindakan koersif guna mengambil alih tanah-tanah yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat sebagian besar sebagai petani. Desa Wadas kaya akan sumber daya alam yang menopang pangan kehidupan masyarakat disana sudah siap untuk dijarah oleh sebuah moda produksi yang bersifat kanibalistik (*accumulation by dispossession*). Kenyataan ini membuat proses kontra-hemogen pun terjadi yaitu terciptanya gerakan perlawanan rakyat menentang berbagai upaya perlucutan-perlucutan ruang kehidupan rakyat ini.

Kedua, adanya berbagai peristiwa konflik sosial yang berujung dengan kerusuhan ataupun kekerasan yang membuat kita ragu, apakah konflik yang di timbulkan nantinya akan berdampak negatif. Pendapat Ralf Dahrendorf, menjelaskan dimana konflik hanya akan timbul melalui hubungan sosial pada sistem. Konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak

terhubung dalam sistem. Teori Dahrendorf, kekuasaan menentukan hubungan struktur sosial (Novri Susan, 2009: 39). Kekuasaan menurut Dahrendorf yakni kekuasaan sanksi dan kontrol, yang menjadikan mereka yang berkuasa menetapkan perintah serta mengambil keuntungan dari yang lemah. Pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Dahrendorf pertama kali merumuskan teori konflik sebagai teori parsial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Dahrendorf mencermati masyarakat memiliki dua sisi berbeda, yaitu konflik dan kerja sama. Berangkat dari gagasan itu, Dahrendorf menganalisa permasalahan sosial melalui sudut pandang sosiologi struktural-fungsional guna penyempurnaan teorinya. Dahrendorf pun mengadopsi teori perjuangan kelas milik Marxl guna membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri. Dehrendorf mengkolaborasikan pemikiran fungsional mengenai struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antarkelas sosial. Dehrendorf tidak menganggap masyarakat sebagai suatu hal yang statis, melainkan bisa berubah oleh adanya konflik sosial.

Konflik bisa dipahami sebagai perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk memperjuangkan nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya bersifat langka pada kelompok lain. Semua bisa dijalankan melalui merusak lawan atau menghilangkannya, menyebabkan lawan merespons dengan upaya yang sama. Konflik juga merupakan sebuah perlombaan sebagai kondisi yang sangat diperlukan dari setiap elemen masyarakat. Seperti

konflik yang terjadi antara kehidupan masyarakat saat ini, baik dari lingkungan tentang adat istiadat, agama, maupun ras di suatu negara.

Ketiga, konflik diakibatkan dari rusaknya lingkungan antara negara dengan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo merupakan sebuah kompetisi tanpa melalui kontak langsung demi mendapatkan suatu tujuan yang di harapkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat kontra di Desa Wadas dalam rencana pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batu andesit tersebut mengharapkan bahwa masyarakat ingin melestarikan kehidupan alam di kawasan Wadas sesuai dengan warisan nenek moyang mereka, lain pula dengan apa yang di inginkan oleh pemerintah adalah pembangunan dan penambangan batu andesit diharapkan bisa mempercepat proyek strategis nasional dan pembangunan nasional agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar misalnya pasokan listrik, air dan sebagainya.

Konflik ini terjadi karena pihak pemerintah daerah Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo mendukung dan menyetujui terlaksananya pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batu andesit di desa Wadas bahkan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk percepatan pembangunan Bendungan Bener. Masyarakat menolak keras adanya penambangan batu andesit, karena mereka memiliki alasan bahwa kawasan Wadas adalah kawasan sumber alam untuk kehidupan masyarakat sekitar sudah sejak nenek moyang mereka. Hingga pada tahun 2022 penolakan masyarakat adanya penambangan batu andesit di Wadas terus berlanjut, masyarakat melakukan

aksi-aksi penolakan seperti melakukan penuntutan terhadap pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan melakukan demo serta penghadangan terhadap pihak pemerintah yang melakukan pengukuran tanah di kawasan Desa Wadas agar tidak memaksa dan melakukan penambangan.

Keempat, konflik horizontal, konflik ini terjadi di kalangan massa atau rakyat sendiri, baik antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Konflik muncul di antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relative sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. Permasalahan yang ditimbulkan antara pemerintah dengan masyarakat lokal yang tinggal di kawasan Wadas menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti bagai mana peran seharusnya pemerintah dan negara menghadapi situasi dimana seharusnya pemerintah dan negara memberikan perlindungan kepada masyarakat. Masyarakat lokal yang tinggal kawasan Wadas menolak keras adanya penambangan batu andesit akan merusak kelestarian alam dan sumber daya alam kawasan Wadas yang telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar Desa Wadas. Hasil pembahasan ini, di harapkan mempunyai titik temu suatu solusi dari pemerintah untuk masyarakat lokal demi menyelamatkan kelestarian lingkungannya yang telah menjadi sumber kehidupan bagi mereka.

Melihat persoalan krisis lingkungan saat ini yang semakin dikuasai oleh pemerintah, maka perlu kajian mendalam tentang konflik negara dan rakyat (analisis aktor dan kepentingan pada kasus Wadas, Purworejo, Jawa Tengah) melibatkan masyarakat sekitar Wadas, para aktor pemerintah melalui kebijakan pemerintah seperti mengeluarkan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL), untuk kelangsungan pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batu andesit akan mengakibatkan kerusakan sistem alam di sekitar Wadas yang mana sudah lama menjadi sumber air dan mata pencaharian bagi masyarakat Desa Wadas untuk kelangsungan hidup mereka. Penelitian ini akan mengungkapkan fenomena-fenomena yang menimbulkan konflik negara dan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Fokus penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo tepatnya di Desa Wadas yang menjadi tempat rencana penambangan batu andesit yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah antara Desa Wadas memiliki ekosistem alam yang baik, sumber mata air yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di Wadas, baik dari segi mata airnya dan lahan yang digunakan untuk area persawahan masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian mereka sebagai petani, sehingga timbul konflik dari masyarakat sekitar Wadas dengan melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Masyarakat mengecam keras kepada pemerintah untuk membatalkan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas karena Desa ini menjadi sumber mata pencarian dan penghidupan bagi masyarakat. Masyarakat memikirkan dampak kedepan jika penambangan batu andesit tetap dilakukan, maka kelak keturunan anak cucuk mereka tidak dapat hidup dalam lingkungan yang masih asri.

Pemerintah tidak mempedulikan syarat keseimbangan lingkungan, karena yang paling penting bagi pemerintah adalah pembangunan Bendungan Bener ini bisa segera dibangun agar bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Tesis ini akan memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik dan dari hasil penelian ini juga akan memaparkan kajian kritis terhadap perkembangan ilmu politik yang berkaitan dengan ekonomi politik dan ekologi politik.

Uraian latar belakang diatas dapat dikatakan secara umum bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya konversi lahan di Desa Wadas. Secara nyata jelas terlihat bahwa lemahnya implementasi regulasi yang dilakukan oleh elemen-elemen pemerintah berkaitan dengan homogeni kapitalis dalam kebijakan pengolahan lingkungan kawasan Wadas. Berkenaan dengan hal tersebut permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa konflik negara dan rakyat terjadi dalam penolakan masyarakat terhadap pertambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo?
2. Apakah terdapat pertarungan kepentingan ekonomi, sosial atau politik dalam penolakan masyarakat terhadap pertambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo?
3. Siapa sajakah aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut ? Apa kepentingan aktor-aktor tersebut ?

4. Apa dampak yang di timbulkan dari konflik negara dan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap pertambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik negara dan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap petambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
2. Mengidentifikasi adanya pertarungan kepentingan ekonomi, sosial atau politik dalam penolakan masyarakat terhadap pertambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
3. Mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik negara dan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap petambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
4. Untuk menganalisis dampak dari konflik negara dan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap pertambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara spesifik serta rinci yang diperoleh melalui sejumlah pihak yakni:

1.4.1 Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam penelitian mengenai ekologi politik. Selain itu penelitian ini dapat menjadi literatur bagi akademisi yang ingin mengkaji lebih lebih jauh mengenai konflik ekologis terhadap pertambangan batu andesit.

1.4.2 Bagi Pemangku Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan bagi para pemangku kebijakan atau stakeholder dalam pembuatan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dengan pertimbangan berbagai aspek.

1.4.3 Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman masyarakat mengenai kasus konflik sumber daya alam khususnya di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dari kacamata ekologi politik.

1.5 Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta penelitian serta menjelaskan perbedaannya, Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Penelitian yang akan peneliti lakukan ini benar-benar secara orisinal. Berikut akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Pertama, penelitian oleh Imam Budiharto (2022) dengan judul “Konflik Politik Agraria Di Desa Wadas Pasca Rencana Pembangunan Bendungan Bener

Kabupaten Purworejo 2018-2021”, penelitian ini meneliti dinamika konflik agraria yang terjadi antara BBWSSO dengan masyarakat Desa Wadas dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik politik agraria di Desa Wadas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan paradigma non positivisme, serta menggunakan perspektif developmentalisme dan pendekatan penelitian studi kasus. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian memaparkan bahwa penyebab utama terjadinya konflik adalah usaha masyarakat Desa Wadas untuk mempertahankan lahan perkebunan dan menolak apabila lahan perkebunan mereka dijadikan lokasi pertambangan terbuka (quarry) batuan andesit untuk material pembangunan Bendungan Bener. Konflik yang berlangsung di Desa Wadas telah melalui tiga tahapan yaitu pra konflik, konfrontasi, serta krisis, dimana ada dinamika pada tiap tahapan tersebut. Tahapan prakonflik diawali ketika masyarakat merasa resah akan kehilangan lahan perkebunan mereka serta muncul pemikiran untuk mempertahankan lahan tersebut. Tahapan konfrontasi ditandai dengan timbulnya gerakan penolakan masyarakat Desa Wadas yang setelah itu tergabung kedalam GEMPADEWA. Tahapan krisis ditandai dengan terdapatnya aksi kekerasan yang dicoba oleh pihak kepolisian semacam pemukulan serta penarikan paksa. Konflik tersebut masih berlangsung pada tahapan krisis sampai penelitian berakhir serta belum menggapai tahapan pasca konflik. Aktor yang ikut serta dalam konflik politik agraria yang terjadi di Desa Wadas ialah masyarakat yang tergabung dalam GEMPADEWA, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten

Purworejo, Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Wadas, serta dua (2) Lembaga Swadaya Masyarakat ialah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, LBH Ansor PWNNU Jawa Tengah dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Yogyakarta.

Kedua, penelitian oleh Tia Subekti (2016) yang berjudul “*Konflik Samin vs PT semen Indonesia*”, penelitian berikut menggambarkan tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia disaat ini sering menghadirkan pro kontra serta gesekan diantara sebagian kelompok kepentingan seperti pemerintah, swasta, serta komunitas. Terdapatnya perbedaan kepentingan diantara mereka sebagai dasar utama timbulnya konflik. Satu diantaranya merupakan konflik antara suku Samin dengan PT. Semen Indonesia yang melibatkan negara dalam perihal ini pemerintah daerah. Masyarakat dari suku Samin menentang atas berdirinya pabrik semen di daerah mereka. Pada tulisan ini, penulis berupaya melihat perihal apa yang melatarbelakangi konflik, bagaimana perlawanan masyarakat suku Samin terbentuk, serta dampak apa yang terjadi akibat konflik tersebut. Perspektif teori konflik Dahrendorf tulisan ini pada kesimpulannya merujuk pada tiga kesimpulan akhir. Pertama, konflik terjadi akibat terdapatnya dualisme kepentingan antara masyarakat suku Samin dengan perusahaan semen serta pemerintah daerah. Kedua, masyarakat suku Samin melakukan perlawanan melalui jalan hukum, pergerakan, serta media sosial. Terakhir, konflik ini pada kesimpulannya memunculkan perubahan tatanan dalam lingkungan masyarakat suku Samin, ialah perubahan struktur ekonomi dan timbulnya perpecahan internal didalam masyarakat Samin sendiri.

Ketiga, penelitian oleh Irwandi, Endah R. Chotim dengan judul “*Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)*”, penelitian berikut mengungkapkan kronologis konflik, faktor- faktor pemicu konflik, wujud konflik serta penyelesaian konflik antara masyarakat, pemerintah serta penambangan pasir perusahaan di Desa Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Konflik yang berlangsung di Dusun Sungai Samak dilatarbelakangi oleh minimnya sosialisasi, kurang terbukanya pemerintahan desa kepada masyarakat, perbedaan pentingnya dampak dari aktivitas pertambangan. Bentuk- bentuk konflik sosial yang berlangsung di Dusun Sungai Samak merupakan konflik vertikal serta konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antar masyarakat, pemerintah desa serta perusahaan pertambangan. Sisi lain, permasalahan horizontal muncul pada penduduk tersebut antar golongan yang mendukung dan menentang lantaran urusan yang berbeda. Langkah-langkah resolusi permasalahan yang dilaksanakan publik, pemerintah, serta industri tambang termasuk perundingan (kosulasi, mediasi dan arbitrase).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rinel Fitlayen (2015) dengan judul “*Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman*”, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sebaliknya proses pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara tidak berstruktur. Hasil penelitian menarangkan Tanah ulayat di Minangkabau ialah bukti diri masyarakat serta dilindungi keberadaannya oleh negara yang tertuang dalam UUPA.

Mempertahankan kebedaraan tanah, tidak heran terjalin peningkatan intensitas konflik di tengah masyarakat, apalagi penyumbang masalah terbanyak di pengadilan merupakan kasus tanah ulayat. Konflik yang terjadi bukan saja mengaitkan antar masyarakat namun pula masyarakat dengan negara yang diakibatkan karna aspek kepentingan kedua belah pihak. Tulisan ini ingin mendeskripsikan konflik antara anggota kalangan Caniago dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman. Konflik yang melibatkan kedua belah kelompok telah berlangsung semenjak tahun 2002 hingga 2015.

Ke-lima, penelitian yang berjudul “*Negara vs Masyarakat: Konflik Tanah di Kabupaten Nagekeo, NTT*”, oleh Fransiskus X. Gian Tue Mali (2015), penelitian ini memaparkan konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Nagekeo antara negara VS masyarakat. Bahwasanya negara diwakili oleh pemerintah, jika di daerah kadang-kadang disebut sebagai pemerintah daerah dalam proses pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum sering menghadapi masalah kompensasi dalam bentuk masalah pembebasan lahan dan kepemilikan lahan. Isu-isu ini seringkali menimbulkan permasalahan diantara masyarakat dengan pemerintah, terkadang menimbulkan anarki dan kekerasan. Meskipun keputusan yang diambil kadang-kadang telah selesai tetapi konflik tidak akan berhenti di situ dalam beberapa konflik tanah di Indonesia. Kesimpulannya, peneliti membuat kesimpulan bahwasanya konflik tanah antara negara VS masyarakat Nagekeo terletak pada kepemilikan lahan kesalahan pengaturan dan penyimpangan dari Undang-undang dan Peraturan Presiden tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selain itu ada kepentingan pribadi dan kelompok yang memicu konflik di Nagekeo.

Ke-enam, penelitian RA Riggs dkk (2016) dengan judul “*Penguasaan Hutan Dan Konflik Di Indonesia: Perebutan Hak Di Desa Rempek, Lombok*”, penelitian ini menjelaskan tentang kepemilikan lahan di Indonesia diatur oleh kombinasi kompleks dari pengaturan tradisional, formal serta informal. Ambiguitas hukum atas tanah serta sumber energi alam sudah menyebabkan ketidakamanan tenurial, berakibat pada mata pencaharian serta melanggengkan konflik. Hasil penelitian meninjau hukum pertanahan serta hutan di Indonesia serta pengaruhnya terhadap mata pencaharian serta konflik dan mempelajari akibat ketidak pastian penguasaan tanah di Desa Rempek di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Desa Rempek, konflik tenurial lahan serta batasan hutan sudah terjalin semenjak tahun 1984. Peneliti menyusun kronologi peristiwa dari dialog dengan bermacam pemangku kepentingan serta mendapatkan dokumen hukum buat menunjang analisis kami. Faktor utama konflik merupakan ketidaksepakatan mengenai batas-batas hutan antara Kementerian Kehutanan serta Badan Pertanahan Nasional. Ketidaksepakatan ini sudah meningkat serta memunculkan ketidakpastian, yang berakibat negatif terhadap kehidupan di daerah tersebut. Penyelesaian konflik di Desa Rempek memerlukan pendekatan multi- stakeholder serta konvensi antara Kementerian Kehutanan serta Badan Pertanahan Nasional menimpa batasan hutan serta klasifikasi eksplisit status lahan di daerah konflik. Penelitian kasus ini relevan dengan sengketa kepemilikan lahan yang kesekian di Indonesia kontemporer. Konflik agraria serta ketidakamanan tenurial sudah mendesak gerakan keadilan politik serta sosial di segala negara. Reformasi tenurial hutan serta lahan baru- baru ini di Indonesia membuka jalan baru buat pengaturan tenurial hutan lokal dalam

situasi semacam Desa Rempek. Pendekatan lanskap terpadu timbul di Indonesia serta mempunyai elemen yang bisa berkontribusi buat menuntaskan ketidakpastian kepemilikan lahan. Sebab jaminan kepemilikan tanah menopang mata pencaharian untuk sebagian besar warga Indonesia.

Ke-tujuh, penelitian yang dilakukan oleh Hartuti Purnaweni dkk (2018) yang berjudul “*Konflik antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan karts Kabupaten Pati*”, penelitian ini menerangkan permasalahan lingkungan yang memunculkan konflik antar pemangku kepentingan terjadi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, kala masyarakat sekitar Samin Masyarakat serta perusahaan tambang ikut serta sengketa situasi di kawasan karst pegunungan Kendeng Utara. Gunung ini diketahui dengan kekayaan batu kapurnya sebagai hasil proses alam lewat ruang serta waktu geologis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif- kualitatif, dengan fokus pada aspek konflik antara masyarakat lokal dengan PT. Semen Gresik Tbk, serta antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Pati. Pengumpulan informasi penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, serta analisis sumber sekunder. Informasi kualitatif dianalisis dengan pendekatan deskriptif- kualitatif yang lebih diketahui dengan analisis deskriptif kualitatif. Terdapat konflik kepentingan antara mereka yang sepakat serta tidak sepakat dengan eksploitasi karst buat pabrik semen yang sudah mereka tahu secara nasional. Strategi penentangan masyarakat sekitar kawasan karst di Kabupaten Pati dengan menentang kooptasi industri semen seragam dengan strategi yang diterapkan pada konflik- konflik yang lain. Strategi pergeseran konflik semen di Pati susah dilenyapkan sebab telah mengakar kokoh Saminisme. Oleh

sebab itu, mediasi yang lebih baik harus dicoba dengan baik. Sumbangsih pemikiran dalam literatur review diatas diantaranya yaitu:

1. Konflik tanah terjadi di sebabkan oleh kepemilikan lahan, kesalahan pengaturan dan penyimpangan dari Undang-undang dan Peraturan Presiden tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selain itu ada kepentingan pribadi dan kelompok yang memicu konflik.
2. Konflik akan menyebabkan perubahan tatanan dalam lingkungan masyarakat suku Samin, yakni perubahan struktur ekonomi serta munculnya perpecahan internal didalam masyarakat samin sendiri.
3. Konflik terjadi dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi, kurang terbukanya pemerintah kepada masyarakat, perbedaan pentingnya dampak kegiatan pertambangan. Bentuk konflik sosial yang terjadi adalah konflik vertikal dan konflik horizontal.
4. Konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan antar masyarakat tetapi juga masyarakat dengan negara yang disebabkan karena faktor kepentingan kedua belah pihak.
5. Konflik yang terjadi melalui tiga tahapan yakni pra konflik, konfrontasi, dan krisis, dimana terdapat dinamika pada setiap tahapan tersebut.
6. Pemicu utama konflik adalah ketidaksepakatan. Penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan multi-stakeholder dan kesepakatan mengenai batas hutan dan klasifikasi eksplisit status lahan di wilayah konflik.
7. Penyebab terjadinya konflik sosial yakni perbedaan antar individu, kepentingan, dan perubahan sosial.

Kekurangan atau kritik yang belum diteliti dari literatur diatas adalah belum adanya penelitian yang fokus pada faktor penyebab terjadinya konflik, pertarungan kepentingan ekonomi, sosial atau politik, aktor-aktor dan kepentingan yang terlibat dalam konflik serta dampak dari konflik.

Hasil kajian literatur review di atas, maka penelitian ini dinilai berbeda dengan beberapa penelitian diatas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada faktor-faktor penyebab konflik tahapan konflik dan peran pemerintah dalam penyelesaian konflik, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan selain membahas faktor penyebab konflik, membahas pertarungan kepentingan ekonomi, sosial atau politik, aktor dan kelompok kepentingan yang terlibat dalam konflik serta dampak dari konflik negara dan rakyat terhadap analisis aktor dan kepentingan pada kasus Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian dan kondisi masyarakat yang berbeda pula, penelitian dilakukan di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Konflik

Teori konflik banyak dikemukakan oleh para ahli seperti pendapat dari teori Karl Marx dimana teori ini menjelaskan penyebab terjadinya konflik ialah sejarah kehidupan masyarakat ditentukan oleh sebuah materi atau benda yang berbentuk alat produksi, dan alat produksi ini untuk menguasai kehidupan masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang dihasilkan akan menghasilkan komoditas dan komoditas tersebut diperlukan masyarakat secara sukarela. Menurut Marx fakta

terpenting adalah materi ekonomi karena konflik ini bisa terjadi ketika faktor ekonomi dijadikan sebagai penguasaan terhadap alat produksi.

Pendapat lain dikemukakan Ralf Dahrendorf, dimana setidaknya ada empat poin kenapa konflik didalam masyarakat bisa terjadi: (a) setiap masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan kata lain perubahan sosial adalah gejala yang melekat dalam masyarakat (b) setiap masyarakat mengandung konflik-konflik dalam dirinya, atau dengan kata lain konflik ialah merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat (c) setiap unsur yang ada dalam masyarakat memberikan sumbangsih terhadap terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial (d) setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atas dominasi oleh sejumlah orang atau sejumlah orang-orang lain. Perubahan sosial yang dimaksud timbul dari kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan didalam setiap masyarakat. Menurut Dahrendorf kontradiksi intern tersebut bersumber di dalam kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas (authority) secara tidak merata, suatu hal yang senantiasa mengakibatkan timbulnya dua macam kategori sosial di dalam setiap masyarakat, yakni: mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas. Pembagian otoritas yang dikotomis serupa itu oleh para penganut pendekatan konflik di anggap sebagai sumber timbulnya konflik-konflik sosial di dalam setiap masyarakat. hal ini karena pembagian otoritas yang demikian, di dalam dirinya sendiri menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu sama lain. Pembagian otoritas yang demikian mengakibatkan mereka yang

menduduki posisi sebagai pemegang otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas memiliki kepentingan-kepentingan berlawanan satu dengan yang lain.

a) Definisi Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang memiliki karakter yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatar belakangi terjadinya konflik.

Secara etimologi konflik bersumber dari kata latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Jadi, “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan lain-lain sebagainya yang melibatkan dua pihak atau lebih (Elly M setiady dan Usman Kolip, 2013: 347).

Menurut (Wirawan, 2010:1-2) Konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.

Konflik adalah suatu pertentangan secara langsung dan sadar antara individu atau kelompok untuk mencapai cita-cita bersama, dalam menciptakan cita-cita bersama, pihak lawan yang terlibat dalam konflik itu perlu dihabisi terlebih dahulu karena adanya perasaan permusuhan yang kuat, kali peniadaan lawan lebih penting dari pencapaian cita-cita (Rahman, 2011:57).

Sementara Soerjono Soekanto (2006:91) memaparkan bahwasanya bahwasanya konflik yakni sebuah aktivitas sosial dimana individu ataupun sekelompok berupaya mencapai tujuannya melalui melawan pihak lawan dan memakai kekerasan ataupun ancaman.

Konflik bisa muncul dalam jenis masyarakat atau struktur sosial manapun, dari sini apat disimpulkan bahwa konflik ialah sebuah kondisi akibat pertentangan diantara keinginan, tujuan ataupun nilai yang bisa diwujudkan hingga menimbulkan keadaan ketidaknyamanan pada seseorang ataupun sekelompok.

Konflik muncul dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat antara pemerintah, kelompok pro dan kelompok kontra terhadap rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, salah satu kawasan yang terkena dampak dan menjadi lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener. Pengambilan batu andesit harus dilakukan untuk percepatan pembangunan Bendungan Bener. Konflik Wadas bukan hanya dipicu antar kelompok masyarakat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetapi juga dengan pemerintah daerah Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo.

Tahun 2021 masyarakat Wadas pernah menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas di terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang lokasi izin pengadaan lahan di Desa Wadas. Tuntutan yang di ajukan ditolak oleh PTUN Semarang melalui putusan pada bulan Agustus 2021. Masyarakat Wadas menolak pertambangan batu andesit di Desa Wadas karena akan merusak lingkungan. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya disampaikan

Pemerintah Daerah kepada masyarakat Wadas namun tidak disampaikan. Oleh karena itu, dampak-dampak negatif akibat perertambangan batu andesit tidak diketahui oleh masyarakat.

b) Jenis-jenis Konflik

Beragam jenis konflik dan dapat digolongkan berdasarkan kriteria konflik. Konflik bisa digolongkan menurut latar belakang konflik, pihak yang berkonflik, dan substansi konflik, diantaranya konflik pribadi, interpersonal, kepentingan, antara realitas serta non-realitas, destruktif serta konstruktif, serta permasalahan lingkup kehidupan (Wirawan, 2010:55).

Menurut Wirawan (2010:116) konflik dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik yang berkonflik, yakni:

1. Konflik Vertikal

Konflik yang terjadi antara elit dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

2. Konflik Horizontal

Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang statusnya relatif sama, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.

c) Faktor Penyebab Konflik

Konflik sering terjadi karena ada pihak-pihak yang ingin menguasai sesuatu dan kepentingannya saling bertentangan. Faktor dari konflik sumber daya alam

dalam kajian ekologi sangatlah beragam. Suatu konflik sumber daya alam dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara aktor pengelola yang mana kemudian menjadi penyebab munculnya sebuah konflik. Ketidakjelasan batas-batas wilayah kelola juga kerap juga menjadi faktor yang paling dominan karena masing-masing aktor akan saling mengakusisi, seperti yang ditulis oleh Noer Fauzi dalam jurnal *Bhumi* (2013:3) menyebutkan sebab-sebab terjadinya konflik adalah:

1. Izin/hak/konsensi oleh pejabat publik (Menteri Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, dan Bupati) yang memasukan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat kedalam konsensi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produk, ekstrasi maupun konservasi.
2. Pemakaian kekerasan, manipulasi dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstrasi maupun konservasi.
3. Ekskulasi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan dalam konsesi dalam badan usaha raksasa tersebut.
4. Perlawanan langsung dari rakyat sehubungan ekskulasi tersebut.

Selain itu Soerjono Soekanto (2006:91-920) menjelaskan bahwa penyebab konflik diantaranya :

1. Perbedaan antara individu-individu.

Perbedaan sikap dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasasaan diantara keduanya.

2. Perbedaan Kebudayaan.

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang melatarbelakangi pembentukan serta perkembangan kepribadian, dan sedikit banyak akan mempengaruhi karakter seseorang dalam kebudayaan tersebut.

3. Perbedaan Kepentingan.

Perbedaan kepentingan antara orang individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya.

4. Perbedaan sosial.

Perubahan sosial secara cepat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bisa menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

d) Sebab Terjadinya Konflik

Sebab terjadinya konflik adalah karena ada ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan. Misalnya kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya yang kemudian akan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat.

Perbedaan dan pertentangan yang terjadi antara aktor biasanya berawal dari hal-hal yang menurut Diana Francis (2006: 29) antara lain:

1. Komunikasi

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit di mengerti dan informasi yang tidak lengkap.

2. Struktur

Perebutan kekuasaan antara kepentingan atau sistem yang saling bertentangan, persaingan untuk sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dari dua atau lebih kelompok kerja untuk mencapai tujuan mereka.

3. Pribadi dengan kelompok

Ketidakcocokan tujuan ataupun nilai sosial pribadi terhadap sikap di mana mereka diekspresikan dan persepsi yang berbeda dari setiap tujuan.

e) Kondisi Obyektif yang Bisa Menimbulkan Konflik

Konflik merupakan salah satu strategi bagi pemimpin untuk melakukan perubahan. Apabila tidak dapat dilakukan secara damai perubahan di upayakan dengan menciptakan sebuah konflik. Pemimpin menggunakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan. Konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi obyektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut adalah kondisi obyektif yang bisa menimbulkan konflik (Wirawan, 2010: 7-13) :

1. Tujuan yang berbeda dikemukakan Hocker dan Wilmot, dimana konflik muncul karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang tidak sama.
2. Buruknya komunikasi, komunikasi yang buruk sering kali menyebabkan permasalahan pada kelompok. Aspek komunikasi yang memicu permasalahan seperti misrepresentasi, informasi yang tidak disediakan secara umum, serta bahasa yang tidak dipahami komunikator.
3. Karakteristik sosial yang berbeda. Konflik dalam masyarakat seringkali muncul lantaran anggotanya memiliki ciri khas yang berbeda, yakni ras, ideologi, serta agama. Ciri-ciri tersebut seringkali berjalan seiring gaya hidup yang saling eksklusif yang seringkali menyebabkan perselisihan.
4. Pribadi orang, pada kondisi berikut perselisihan timbul dari perilaku tidak percaya serta berpikiran negatif pada seseorang, yang sombong, egois, selalu merasa benar, tidak bisa mengontrol emosinya serta ingin menang sendiri.
5. Kebutuhan, seorang yang mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia, dimana ketika kebutuhan orang terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.

f) Tipe Konflik

Suatu konflik akan digambarkan persoalan-persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada. Tipe-tipe konflik terbagi atas tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan (S.N Kartikasari: 2001: 6):

1. Tanpa konflik, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai itu lebih baik, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif.
2. Konflik laten, bersifat tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
3. Konflik terbuka, adalah yang berakar dari semangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
4. Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

g) Akibat Konflik

Beragam akibat yang disebabkan oleh pertentangan atau konflik, diantaranya (Wirawan: 2010: 106-109):

1. Bertambahnya solidaritas/in-group.
Bila sebuah kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga-warga kelompok biasanya akan meningkat.
2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok.

Kondisi ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok.

3. Adanya perubahan kepribadian individu.

Ketika konflik muncul, ada orang yang bisa mengatasinya dan ada orang yang tidak bisa. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung pada tekanan psikologis.

4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.

Konflik yang berakhir dengan kekerasan ataupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwara manusia.

5. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak

Konflik merupakan fakta yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

1.6.2 Teori Aktor-aktor dan Kepentingan dalam Konflik

Pengelolaan sumber daya alam tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah hingga dunia usaha. Banyaknya aktor yang terlibat bukan berarti distribusi dalam mendapatkan manfaat sumber daya alam juga turut banyak ataupun merata dengan baik, sehingga konflik pun muncul yang kemudian melibatkan banyak pihak dari luar baik untuk mempertahankan kepentingan masing-masing ataupun untuk pendampingan penyelesaian konflik.

Afrizal menjabarkan aktor-aktor struktural yang bisa terlibat konflik. Aktor itu antara lain disebut sebagai aktor komunitas, aktor bisnis serta aktor negara. Aktor komunitas merupakan para aktivis komunitas. Aktivis komunitas dalam Afrizal merujuk kepada penduduk setempat baik yang menguasai lahan serta yang

tidak menguasai lahan. Aktor bisnis merupakan korporasi ataupun perusahaan industri yang mencerna sumber daya alam baik sumber daya perkebunan, perhutanan, pertambangan serta sebagainya. Aktor negara merupakan pemerintah ataupun aparat negara (Afrizal, 2018), selain aktor konflik, ada juga pihak yang terlibat dalam konflik tetapi bukan merupakan pihak dalam konflik. Pihak ini disebut pihak pendamping. Pihak pendamping juga dapat dibagi menjadi (1) pihak pendamping aktor serta (2) pihak pendamping yang merupakan pihak ketiga yang menolong dalam penyelesaian konflik, sebagai contoh di dalam tulisan Jeffrey Hadler (2010) mendeskripsikan kalau aktor yang berkonflik dalam peristiwa perang Padri merupakan kelompok status kalangan islam tradisional serta kalangan islam reformis. Tetapi, di luar kedua kaum tersebut terdapat aktor lain ialah Belanda yang bukan ialah pihak bertikai namun ia mempunyai peran selaku pendamping salah satu kalangan yang bertikai.

Wirawan mengkategorikan para pihak sebagai pihak yang ikut serta konflik dan pihak ketiga. Menghadapi konflik, pihak yang ikut serta konflik berupaya mengelola konflik guna menghasilkan solusi yang menguntungkan dengan memakai berbagai sumber sekecil serta seefisien mungkin, sedangkan pihak ketiga—mediator, arbiter ataupun ombudsman— yang menemukan tugas dari pihak-pihak yang ikut serta konflik buat menyelesaikan konflik (Wirawan, 2009).

Kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik dalam tahapan tertentu yang bisa mendinamisasikan sistem politik, karena bentuk lainnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan dengan adanya pluralisme dan kompetisi di dalam kehidupan masyarakat.

Kelompok kepentingan (interest group) di definisikan sebagai a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests (Mohammad, 2016).

Berdasarkan definisi yang dijelaskan di atas difungsikan sebagai kelompok kepentingan yang terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Kelompok adalah kelompok yang terorganisasi yang sudah memiliki tujuan yang sama secara aktif dan berusaha mempengaruhi pemerintah. Tujuan kelompok kepentingan hanya berusaha agar biasa “mempengaruhi” suatu proses pengambilan kebijakan dalam pemerintah sesuai adanya keinginan kelompok yang diwakilinya. Oleh sebab itu, jika dibandingkan dengan partai politik maka lebih sedikit berbeda dan lebih sempit. Seperti yang sudah di definisi oleh Giovanni Sartori, partai politik sebagai, *any political group that presents at election, and is capable of placing through election, candidates for public offices*. Penjelasan definisi tersebut bahwa partai politik sesungguhnya secara sengaja bertujuan untuk menduduki wakil-wakilnya dalam pemerintah, atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintah.

Menurut Gabriel A. Almond kelompok kepentingan dibedakan menjadi empat bentuk antara lain:

- 1) Kelompok Anomik.

Kelompok ini terbentuk antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan bersifat sementara, tidak memiliki norma dan sistem yang jelas. Kelompok anomik tidak memiliki jaringan resmi dengan organisasi politik maupun instansi lainnya. Organisasi ini terbatas dan longgar pada bentuk-bentuk forum, komite dan sejenisnya. Kelompok

ini juga juga dapat menumbuhkan keberanian rakyat untuk mengambil posisi berbeda dengan penguasa.

2) Kelompok Non-Asosional.

Kelompok Non-Asosional ini tidak terorganisir dan tidak teratur, kegiatan bersifat insidental. Secara teoritik, kegiatan dari kelompok ini merupakan ciri masyarakat yang belum maju, di mana kesetiaan kesukaan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politis.

3) Kelompok Institusional.

Kelompok ini seperti organisasi partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, organisasi keagamaan yang sering kali mendukung kelompok institusional. Kelompok Institusional bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial. Kelompok ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintah, ini dikarenakan basis dari kelompok ini kuat.

4) Kelompok Asosional

Kelompok ini meliputi serikat buruh, kelompok keagamaan, organisasi sosial. Secara khusus, kelompok asosional menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, menggunakan pekerja yang profesional, dan memiliki prosedur yang teratur guna merumuskan kepentingan dan tuntutan. Basis organisasionalnya menempatkannya di atas kelompok non-assosional, strategi dan tujuannya dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Aktor-aktor dan kelompok kepentingan yang terlibat dalam konflik negara dengan rakyat dalam penolakan pertambangan batu andesit di Desa Wadas diantaranya ialah :

a) Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal adalah aktor yang terlibat langsung dalam setiap kasus konflik sumber daya alam. Kepentingan masyarakat terhadap sumber daya alam adalah sebagai tempat tinggal atau bermukim dan untuk keberlangsungan hidup. Masyarakat lokal memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dengan adat mereka melalui cara-cara yang arif, namun mereka menjadi aktor yang paling utama terkena dampak dari rusaknya sumber daya alam akibat keserakahan para korporat/kapitalis.

b) Korporat/kapitalis

Korporat/kapitalis merupakan aktor yang memiliki modal besar untuk melakukan usaha terhadap sumber daya alam dengan tujuan mengeruk keuntungan, baik berupa perusahaan maupun individu. Kepentingannya terhadap sumber daya alam adalah untuk usaha dan mengeruk keuntungan. Para aktor korporat/kapital ini memberikan sedikit uang tali asih yang diberikan kepada masyarakat sekita sebagai bentuk kompensasi bagi masyarakat yang sudah memberikan lahannya. Para korporat/kapitalis memberikan janji-janji kosong yang kemudian menjadi faktor pemicu konflik. Para korporat/kapitalis terus menguras sumber daya alam dari tumpuan hidup masyarakat hingga masyarakat tak berdaya. Orientasi *profit* bagi korporat/kapitalis adalah hal yang paling utama. Sehingga mereka para korporat/kapitalis tidak segan-segan melakukan berbagai cara seperti menipu,

melakukan kekerasan, melakukan pengusiran, dan hal tak manusiawi lainnya demi tercapai tujuan dari mereka.

c) Pemerintah/negara (*state*)

Pemerintah/negara (*state*) merupakan aktor pengambil keputusan dan juga regulator yang sebenarnya paling “berkuasa”. Kepentingannya terhadap sumber daya alam adalah kebijakan dalam mengelolah sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan maupun pelestarian (konservasi), namun ditengah panas-panasnya konflik, keberadaan negara (*state*) kemudian dipertanyakan. Institusi yang seharusnya menyejahterakan kehidupan rakyatnya, keberpihakan pemerintah/negara (*state*) kemudian menjadi hal yang ditunggu-tunggu, khususnya bagi masyarakat lokal, sayangnya negara pun seperti tak memiliki kuasa dalam mengambil keputusan. Negara hanya berpatok pada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, namun dalam pelaksanaannya sering disalahgunakan oleh oknum-oknum negara, tak menghrerankan apabila negara ternyata berusaha mengeruk pundi-pundi keuntungan dari sumber daya alam dengan dalih pembangunan dan peningkatan perekonomian. Negara dengan dalih lain, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, para aparat negara berusaha mati-matian menjaga suatu kawasan dengan tidak mempedulikan manusia di sekitarnya masyarakat lokal. Seperti apapun Akar permasalahan konflik mmasyarakat lokal tetap dan selalu menjadi aktor yang terkena dampak langsung, dikarenakan negara melupakan bagian dari dirinya, yaitu rakyat. Permasalahan ini yang lumrah ketika rakyat meberontak atas ketidakadilan yang di terima dan kemudian tidak percaya lagi terhadap negara.

d) Media

Media berasal dari bahasa latin *medias* yang secara harfiah berarti tengah, perantara, ataupun pengantar (Azhar Arsyad, 2006:3). Batasan yang diberikan oleh para ahli terhadap kata media, sebelum membahas mengenai media lebih lanjut akan dipaparkan mengenai konsep komunikasi. Media merupakan unsur dari proses komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan menggunakan media dan menghasilkan efek dan dampak. Berdasarkan definisi diatas dapat dirumuskan adal lima unsur dalam komunikasi yaitu:

1. Source atau komunikator.
2. Message atau pesan.
3. Channel atau Media.
4. Recciver atau komunikan.
5. Efek atau dampak.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka akan ditentukan pada satu unsur yaitu media. Hal ini karena kasus konflik negara dengan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap pertambangan batu andesit di Desa Wadas juga diangkat ke dalam media cetak (koran) dan terdapat juga di new media atau internet (blog).

Media terbagi menjadi dua yaitu media konservasi dan new media. Media konservasi terdapat dua jenis bentuk media cetak (surat kabar, majalah) dan penyiaran (TV, Radio, Film).

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik Ralf Dehrendorf. Konflik yang terjadi antara negara dengan rakyat dalam penolakan pertambangan batu andesit di Desa Wadas sesuai dengan teori otoritas Dehrendorf

dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki pemegang otoritas sedangkan masyarakat kontra di Desa Wadas adalah pihak yang tidak memiliki otoritas. Masyarakat yang kontra berada di posisi ketidakbebasan yang dipaksakan, sementara itu Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah didelegasikan kekuasaan dan otoritas atas Proyek Startegis Nasional (PSN). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana Pemerintah Pusat di Daerah menetapkan lokasi pertambangan batu andesit di Desa Wadas untuk percepatan pembangunan Bendungan Bener yang masuk kedalam Proyek Startegis Nasional (PSN). Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik negara dengan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas diantaranya adalah terjadinya benturan kepentingan, perbedaan persepsi terhadap sumber daya alam, serta adanya pemerintah dan masyarakat berpolitik.

Selain teori konflik penelitian ini juga melihat dari segi pertarungan kepentingan dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik negara dengan rakyat dalam konflik Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo antara lain: masyarakat lokal, korporat/kepentingan, pemerintah/negara dan gerakan sosial (LSM), tokoh agama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum, serta dampak dari konflik antara negara dengan rakyat dalam penolakan pertambangan batu andesit di Desa wadas yaitu dampak sosial, dampak psikologis, dampak budaya dan dampak ekonomi.

1.7 Kerangka Pemikiran

Konflik yang terjadi antara negara dengan rakyat di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Aktor-

aktor dan kepentingan tersebut kemudian digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu masyarakat, pemerintah (pemda), korporat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ gerakan lainnya. Keempat kelompok tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap kawasan Desa Wadas adalah untuk kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Sisi pemerintah pemerintah memiliki dua peran terhadap Desa Wadas yaitu peran pembangunan dan peran untuk konservasi/pelestarian lingkungan. Peran pemerintah dalam hal ini masih berfokus pada peranan pembangunan dan peningkatan pendapatan, sehingga memungkinkan pemerintah bekerjasama dengan korporat sebagai bentuk upaya peningkatan pembangunan dan pendapatan. Kenyataannya dalam hal ini pemerintah jarang memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lain yang berpengaruh dan akan menciptakan perubahan-perubahan jangka panjang, seperti kerusakan terhadap lingkungan.

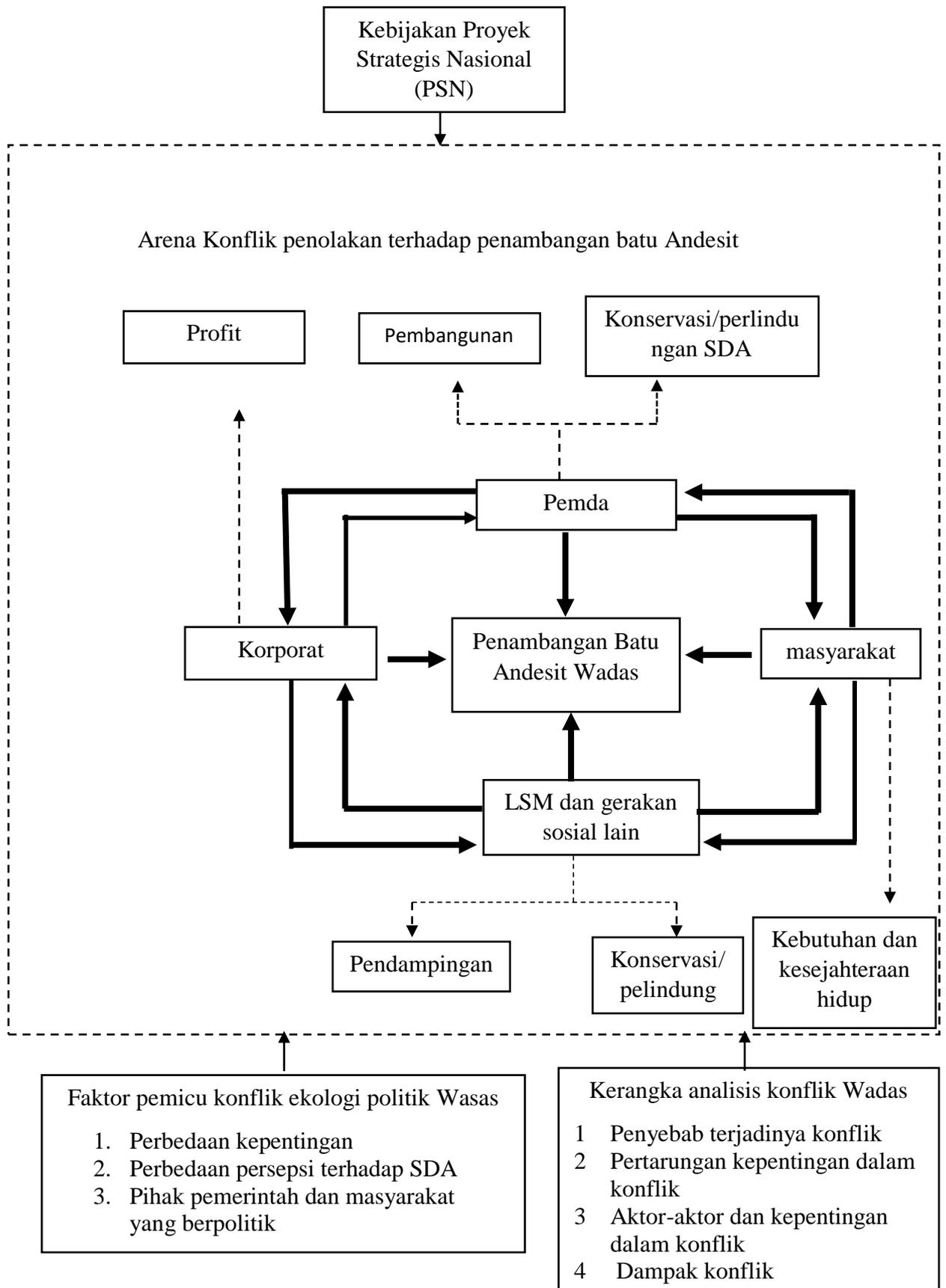
Korporat selalu mencari kesempatan dan peluang untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya profit. Peluang dan kesempatan yang diberikan pemerintah tentu dimanfaatkan oleh korporat untuk mendapatkan keuntungan. Para korporat siap melakukan berbagai macam upaya dan cara untuk mendapatkan peluang dan kesempatan tersebut, sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan gerakan sosial lainnya berjuang mempertahankan kawasan Desa Wadas untuk kepentingan masa depan. LSM dan gerakan sosial lainnya memiliki dua peran penting yaitu untuk pendampingan masyarakat dan konservasi lingkungan, meskipun pengelolaan sumber daya alam diatur oleh pemerintah namun ada aturan-aturan membatasinya.

Kompleksitas konflik selanjutnya dapat dianalisis berdasarkan karakteristik dari konflik, diantaranya adalah dengan mengetahui kedalaman konflik, jenis konflik, frekuensi konflik, serta ketegangan yang terjadi antar aktor. Keempat kerarakteristik konflik tersebut bisa dihubungkan dengan identitas serta kepentingan aktor dalam konflik. Kedalaman konflik menunjukkan sejauh mana konflik terjadi, apakah masih bersifat konflik perkataan ataukah sudah mencapai konflik saling membunuh. Jenis konflik menunjukkan posisi pelaku yang berkonflik. Frekuensi konflik menunjukkan banyaknya konflik yang terjadi setiap satuan waktu, banyaknya konflik yang terjadi dapat diukur setiap minggu, bulan ataupun setiap tahun. Ketegangan antar aktor menunjukkan interaksi aktor. Hal ini dimungkinkan terjadinya interaksi interaktif asosiatif ataupun disosiatif. Masing-masing mempunyai hubungan antara korporat-pemerintah, pemerintah-masyarakat, masyarakat LSM/gerakan sosial, LSM/gerakan sosial, begitu juga sebaliknya. Kemudian menjadi hubungan saling timbal balik. Baik hubungan saling membutuhkan ataupun saling menghilangkan.

Identifikasi faktor-faktor konflik juga menjadi bagian dari analisis konflik. Identifikasi faktor dibutuhkan atau diperlukan untuk mengetahui sejarah awal terjadinya konflik, banyak faktor yang sebenarnya faktor pengembang konflik, namun pasti sebelum konflik menjadi berkembang, ada faktor utama yang menyebabkan konflik itu terjadi. Hasil dari menganalisis berbagai macam literatur, faktor-faktor konflik yang terjadi antara negara dengan rakyat dalam kasus Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo adalah karena adanya benturan kepentingan, perbedaan persepsi terhadap kawasan Wadas, serta adanya pihak

pemerintah dan masyarakat yang berpolitik. Faktor-faktor tersebut hanyalah dugaan yang memungkinkan adanya faktor-faktor lain selain dari faktor-faktor tersebut.

Gambar skema kerangka pemikiran



1.8 Definisi Konseptual

1. Persepsi masyarakat adalah pandangan masyarakat dalam memaknai kawasan Wadas sebagai sumber daya alam.
1. Aktor adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Aktor terbagi menjadi dua yaitu aktor pro dan aktor kontra.
2. Kepentingan aktor adalah apa yang ingin didapatkan oleh aktor dari suatu sumber daya alam, dalam hal ini adalah kawasan Wadas.
3. Pengaruh aktor adalah kekuatan aktor dalam mengintervensi suatu hal, baik dalam hal regulasi, manajemen dan lain sebagainya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan posisi atau jabatan aktor.
4. Kebutuhan aktor adalah apa yang harus dipenuhi aktor dan apabila tidak terpenuhi maka aktor akan mencari alternatif lain.
5. Konflik adalah suatu kondisi dimana adanya perebutan sumberdaya oleh berbagai pihak dengan kepentingannya yang berbeda.
6. Dampak konflik adalah suatu kondisi yang diakibatkan dari adanya konflik.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna terhadap permasalahan individu dan sekelompok orang (Creswell, 2014). Menurut Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, daeri segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan

manusia yang di tekuti (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif biasanya memanfaatkan tiga metode yaitu wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan Dokumen.

Berdasarkan definisi penelitian kualitatif diatas, apabila dikontekskan dengan penelitian ini, maka teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan wawancara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Wadas, Tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LBH dan masyarakat Desa Wadas yang ikut terlibat dalam konflik negara dengan rakyat dalam kasus di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Peneliti selanjutnya melakukan pengamatan langsung untuk melihat faktor penyebab, pertarungan kepentingan ekonomi, sosial atau politik, aktor-aktor dan kepentingan yang terlibat serta dampak dari konflik negara dengan rakyat dalam Kasus di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti akan mendeskripsikan, membahas dengan menganalisis sesuai data yang diperoleh dari informan kemudian merumuskannya dalam sebuah kesimpulan serta memberikan saran dan rekomendasi yang relevan.

1.9.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai faktor penyebab, pertarungan kepentingan ekonomi, sosial atau politik, aktor-aktor yang terlibat dan dampak dari konflik negara dan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap

pertambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Peneliti selanjutnya menganalisis terhadap proses terjadinya konflik, pertarungan kepentingan ekonomi, sosial atau politik, aktor-aktor dan kepentingan yang terlibat serta dampak dari konflik negara dan rakyat dalam kasus di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data primer dan data sekunder dijelaskan sebagai berikut:

a) Data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

Sedangkan menurut Sugiyono (2016:225) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama melalui proses wawancara kepada para informan penelitian. Data primer ini berupa catatan yang didapatkan dalam proses wawancara yang dilakukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Badan Pertanahan Provinsi Jawa

Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Wadas, Tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LBH dan masyarakat Desa Wadas yang dilakukan di rumah ataupun kantor.

b) Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013: 42) data sekunder merupakan data sprimier yang telah diolah lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.

Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:42) data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media pelantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Menurut Azwar (2013:91) data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Pemerintah Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dan berita-berita online terkait konflik yang terjadi di Desa Wadas.

1.9.4 Informan Penelitian

Dengan metode wawancara, maka akan dihasilkan informan secara mendalam dengan cara *face to face* atau wawancara saling berhadap-hadapan atau empat mata dengan informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak terstruktur yang sengaja dirancang untuk menghasilkan berbagai pandangan dari para informan.

Informan penelitian di pilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu dengan *purposive sampling* yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait data penelitian dimana peneliti harus mencari dan menemukan orang yang memahami dan memiliki akses terkait informasi obyek penelitian ini. Sementara itu yang menjadi informan atau objek penelitaian dalam penelitian ini anantara lain yaitu:

a) Pemerintah

1. Gubernur Jawa Tengah

Data yang diharapkan adalah kejelasan tentang SK Gubernur tentang kenapa Desa Wadas ditetapkan menjadi lokasi pengadaan tanah dan batu andesit sebagai material pembangunan bendungan Bener. Kemudian bagaimana mekanisme dalam ganti rugi oleh pemerintah terhadap lahan masyarakat dikawasan Wadas.

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah.

Data yang diharapkan adalah bagaimana prosedur perencanaan pembangunan dan pertambangan batu andesit di Wadas, serta menanyakan tentang Amdal yang dilakukan.

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah.

Data yang diharapkan adalah bagaimana proses bisa terjadinya konflik penolakan pengukuran tanah yang terjadi di Wadas. Kemudian bagaimana mekanisme dalam pembebasan lahan dan ganti rugi oleh Pemerintah terhadap lahan masyarakat dikawasan Wadas.

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purworejo.

Data yang diharapkan adalah bagaimana prosedur perencanaan pembangunan dan pertambangan batu andesit di Wadas, serta menanyakan tentang AMDAL yang dilakukan.

5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo.

Data yang diharapkan adalah mengenai pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan siapa saja.

6. Kepala Desa Wadas

Data yang diharapkan adalah sejauh mana peran pemerintah desa dan keberpihakan terhadap masyarakat setempat dan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap penyelesaian konflik yang terjadi.

b) Lembaga Swadaya Masyarakat Wadas, Lembaga Bantuan Hukum dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Data yang diharapkan adalah sejauh mana monitoring yang telah dilakukan selama ini dan apa saja saran yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten atau Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

c) Organisasi Keagamaan

Data yang diharapkan adalah sejauh mana monitoring yang telah dilakukan selama ini yang dilakukan selama mendampingi masyarakat Wadas dan apa saja saran yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten atau Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

d) Tokoh Masyarakat

Data yang diharapkan adalah sejauh mana peran yang telah dilakukan selama memonitoring dan mendampingi masyarakat Wadas dan apa saja saran yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten atau Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

e) Masyarakat

Data yang diharapkan adalah bagaimana pendapat masyarakat Wadas terhadap dijadikannya Desa Wadas sebagai tempat atau salah satu lokasi untuk pengadaan tanah dan batu andesit untuk material pembangunan Bendungan Bener. Data lain tentang apa saja upaya yang dilakukan oleh masyarakat terhadap konflik yang terjadi di Wadas dan kenapa mereka menolak dan mendukung adanya penambangan batu andesit di Desa mereka.

Tabel 1.1 Informan Wawancara

No	Instansi	Informan	Jumlah
1.	Pemerintah Jawa Tengah	Gubenu	1
		Kepala Bappeda Jawa Tengah	1
		Kepala Kanwil Badan Pertanahan Jawa Tengah	1
2.	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Purworejo	1
		Kepala Kantor Pertanahan Purworejo	1
3.	Kepala Desa Wadas	Kepala Desa Wadas	1
4.	LSM/Peguyuban, LBH dan WALHI	Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	1
		Ansor Jawa Tengah dan Yogyakarta	1
		Pengurus Paguyuban (GEMPADEWA)	1
		Pengurus Walhi Yogyakarta	1
5.	Ormas Keagamaan	Pengurus PCNU Purworejo	1
6.	Tokoh Agama dan Masyarakat	Rois Syuriah PWNu Jawa Tengah (KH. Ubaidullah Sodaqoh)	1
7.	Masyarakat	Masyarakat pro dan kontra	3
	Total		13

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti melalui kegiatan wawancara mendalam (*indepth*

interview) dengan para informan, dan dilakukan secara tidak terstruktur serta informal dalam berbagai situasi dan observasi terbatas. Kegiatan wawancara peneliti menggunakan beberapa alat sebagai pendukung untuk merekam dan mendokumentasikan dari seluruh hasil wawancara. Alat bantu diantaranya yaitu buku catatan, kamera dan rekaman suara selama pelaksanaan wawancara berlangsung. Hasil dari wawancara ini akan dicatat dan didokumentasikan dengan baik oleh peneliti agar dapat diinterpretasikan pada hasil penelitian. Kemudian hasil rekaman yang didapatkan dari objek wawancara tersebut didengar dan dibuat narasi dalam bentuk tulisan atau hasil laporan.

Observasi dilakukan terbatas dimaksudkan untuk mengamati terkait dengan proses terjadinya konflik antara negara dan rakyat. Fenomena yang diamati adalah penyebab terjadinya konflik, pertarungan kepentingan, aktor dan kepentingan serta dampak yang konflik pada kasus Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti selain menggunakan sumber data primer tersebut, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi berupa studi literatur, artikel, hasil penelitian, dan dokumentasi terkait. Adapun data sekunder yang akan ditelusuri menyangkut konflik yang terjadi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

1.9.6 Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis setelah data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan (Sugiono, 2016:245)

Teknik analisa dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman (1984), dimana model ini berawal dari pengumpulan data mentah, mendisplay data, reduksi data dan sampai ke verifikasi dan kesimpulan data.

Penelasan dari teknik analisis data ini sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Dalam reduksi data berarti peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya apabila diperlukan. Tahap ini peneliti mencoba menguraikan atau memisahkan dari hasil yang telah didapat dalam wawancara dan juga dokumentasi yang sudah dikumpulkan sehingga menjadi suatu data yang utuh.

b) Display data atau penyajian Data

Penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat naratif atau penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Tahap ini peneliti melakukan penyajian data dari yang sebelumnya suatu data yang utuh menjadi sebuah teks yang bersifat naratif dan dapat berbentuk bagan, hubungan antar kategori dan yang lainnya

c) Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tahap ini peneliti melakukan kesimpulan sementara

dari data-data yang telah disajikan tetapi jika ditemukan bukti lain yang dapat mendukung maka akan ada perubahan pada pengumpulan data dan kesimpulan berikutnya.

1.9.7 Validitas Data

Menjamin keterdalaman (validitas) data dalam penelitian ini dilakukan melalui trigulasi. Menurut Muthinson (Sugiono, 2015:85) tekni triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas) tidak konsisten atau kontradiksi, oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data dan analisis data maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Menurut Denzi dalam buku yang berjudul “Sociological Methods: Source Book (2nd edition)” yang dikutip oleh Miles dan Huberman memaparkan bahwa metode yang digunakan dalam triangulasi yaitu melalui observasi dan dokumentasi interview (Miles & Huberman, 1994), sesuai dengan penelitian yang dilakukan karena menyeimbangkan informasi yang masuk melalui wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, literatur review, kerangka teori, metodologi penelitian.

Bab II berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian. Bagian yang dibahas dalam bab ini meliputi gambaran Desa Wadas, kondisi geografis Desa Wadas, kondisi demografis Desa Wadas, kondisi pendidikan Desa Wadas, kondisi ekonomi Desa Wadas, kondisi sumber daya alam Desa Wadas, kondisi

Pemerintahan Desa Wadas dan deskripsi konflik negara dengan rakyat dalam penolakan masyarakat terhadap petambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

Bab III pembahasan hasil penelitian, berisi tentang data yang diperoleh dari lapangan baik berupa deskripsi wawancara, deskripsi tentang analisis teks, dan lain sebagainya. Bab ini membahas ekplanasi penyebab terjadinya konflik penolakan pertambangan batu andesit di desa wadas, pertarungan kepentingan dalam konflik di Desa Wadas, aktor-aktor dan kelompok kepentingan yang terlibat dalam konflik di Desa Wadasserta dampak konflik negara dan Rakyat dalam penolakan pertambangan batu andesit di Desa Wadas. .

BAB IV adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan sintesis dari pembahasan penelitian dan juga saran sebagai jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian.

Daftar Pustaka yang berisi daftar sumber rujukan dari artikel jurnal berputasi dan buku teks untuk menghindari kegiatan plagiarism karya peneliti lainnya.